



MISA UMUM MINGGUAN DI VATIKAN

Paus Fransiskus menyapa jemaat saat misa umum mingguan di Aula Paul VI, di Vatikan, Rabu (22/9).

Korsel-Jepang Gelar Pertemuan Untuk Akhiri Perselisihan

Jepang dan Korsel memiliki perbedaan dalam cara memandang masa lalu.

WASHINGTON(IM)- Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) Chung Eui-yong mengatakan akan bertemu dengan menteri luar negeri Jepang. Harapannya kedua negara dapat melangkah maju untuk mengakhiri perselisihan yang mendorong sanksi-sanksi perdagangan.

"Jepang negara tetangga dekat kami dan kami memiliki nilai-nilai yang sama dalam demokrasi, ekonomi pasar, hak asasi manusia dan lain-

lain, maka kami ingin Jepang menjadi teman dekat, tapi sayangnya kami memiliki sejumlah perbedaan dalam memandang sejarah masa lalu," kata Chung kepada lembaga think tank Council on Foreign Relations di New York, Kamis (23/9).

Chung mengaku akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Diskusi akan digelar setelah pertemuan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika

Serikat (AS) Antony Blinken.

Pangkal perselisihan antara Korsel dan Jepang mengenai pendudukan Jepang di Semenanjung Korea dari 1910 hingga 1945 adalah Jugun ianfu. Istilah yang digunakan Jepang pada perempuan yang dipaksa memberi layanan seksual pada tentara Jepang di daerah jajahan.

Perselisihan semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir. Hingga kedua negara saling menerapkan sanksi atau batas perdagangan ke lawan masing-masing. Kedua negara juga saling mengancam mengakhiri kerja sama keamanan meski mereka menghadapi tantangan bersama dari Korea Utara.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan selama enam bulan terakhir para diplomat AS, Korsel dan Jepang sudah menggelar serangkaian pertemuan untuk meningkatkan hubungan Seoul dan Tokyo.

"Sore ini temuannya cukup hangat dan dekat, terutama saat kami mencoba memikirkan dan menyelesaikan apa yang kami lihat dari Korut, terutama peluncuran (rudal) baru-baru ini," kata pejabat yang mengikuti pertemuan trilateral.

"Sebenarnya forum ini lebih pada mencari kepentingan bersama dan bukan lagi memecah kebuntuan," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya itu.

Chung mengatakan Seoul yakin perselisihan dengan Tokyo dapat diselesaikan melalui dialog, termasuk sanksi perdagangan. Ia pun berharap perbedaan tersebut dapat segera dipecahkan. Jika tidak, Korsel akan membawanya ke hadapan Organisasi Perdagangan Dunia.

"Korea sangat berharap dua menteri luar negeri Jepang dan Korsel akan bekerja untuk menormalkan hubungan antara Korsel dan Jepang," katanya.

Chung dan Motegi sempat menggelar pertemuan sela dalam Pertemuan G7 di Inggris bulan Mei lalu. Tapi pertemuan tersebut tidak memecahkan perbedaan kedua negara. ● tom

Prancis Salahkan NATO Penyebab Kesepakatan Australia Batal

PARIS(IM)-Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan batalnya kesepakatan kapal selam dengan Australia disebabkan tidak adanya dialog politik di NATO. Tapi, ia juga menolak gagasan Prancis keluar dari aliansi pertahanan tersebut.

Prancis kehilangan kes-

epakatan senilai 66 miliar dolar AS dengan Australia setelah Negeri Kanguru memutuskan untuk membuat kemitraan pertahanan dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Sehingga, mereka akan membangun kapal selam tenaga nuklir dengan teknologi dua negara tersebut.

"Perilaku Amerika Serikat

dalam situasi mengenai program kapal selam memberi gambaran baru apa yang sudah kami sampaikan selama berbulan-bulan, yaitu tidak ada dialog politik di Aliansi Atlantik," kata Parly di sidang Senat Prancis, seperti dikutip Sputnik, Kamis (23/9).

Ia juga menolak gagasan

Prancis keluar dari struktur komando NATO. Gagasan itu disampaikan sejumlah politisi Prancis usai kesepakatan kapal selam dengan Australia batal. "Apakah hal pantas untuk menutup pintu pada NATO? Saya kira tidak," katanya pekan lalu.

Australia membatalkan kontrak senilai 66 miliar dolar AS

dengan produsen kapal selam Prancis. Mereka memilih membangun kapal selam sendiri dengan teknologi nuklir dari AS dan Inggris. Pengumuman itu disampaikan setelah AS, Inggris dan Australia membentuk kemitraan keamanan yang dinamakan AUKUS. ● ans

Presiden Ukraina Sebut PBB Pensiunan Superhero

NEW YORK(IM)- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebut Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerupai "pensiunan pahlawan super" yang telah kehilangan visinya yang dulu. Ia lantas menyebut berbagai kegagalan PBB di berbagai bidang mulai dari berbagai vaksin virus korona hingga menghentikan perubahan iklim sampai menghentikan aneksasi Rusia atas sebagian negaranya.

Dia pun melayangkan proposal agar PBB menuju ke hotspot global untuk mengadakan pertemuannya dan menawarkan diri menjadi tuan rumah. "Saya tidak ironis. Saya tidak mengolok-olok siapa pun. Sudah waktunya untuk bangun," serunya seperti dikutip dari AP, Kamis (23/9).

Presiden berusia 43 tahun itu berpidato di pertemuan tahunan terbesar diplomasi global untuk ketiga kalinya. Penampilan pertamanya, pada 2019, penuh dengan badai politik AS melalui panggilan telepon antara dirinya dengan Presiden AS saat itu Donald Trump. Trump akhirnya dimakzulkan atas panggilan telepon itu, di mana dia mendorong Zelenskyy untuk menyelidiki Presiden saat ini Joe Biden dan putranya Hunter.

Ketika pertemuan Sidang Umum 2020 digelar secara virtual karena pandemi, Zelenskyy menyatakan harapan bahwa pertemuan itu akan mengantar kembalinya ke multilateralisme yang efektif dan solidaritas internasional yang efektif. Setahun kemudian, Zelenskyy yang frustrasi menyimpulkan pandemi telah menunjukkan bahwa dunia telah "bermain persatuan di mana satu hal adalah untuk berbagi tujuan dan hal lain adalah untuk berbagi vaksin."

Persatuan tampaknya memiliki catatan kaki, kata presiden sebuah negara di mana sekitar 12% orang divaksinasi. "Kita semua berada dalam satu perahu, tetapi akses ke sekoci diberikan terlebih dahulu kepada penumpang kelas satu," celanya.

Zelenskyy kemudian mende-sak dunia untuk meningkatkan tantangan yang lebih efektif terhadap pencaplokan Rusia atas semenanjung Crimea tahun 2014, sebuah langkah yang digambarkan Moskwa sebagai melindungi

orang-orang berbahasa Rusia di sana. Pertemuan berikutnya antara pasukan Ukraina dan separatis yang didukung Rusia telah menewaskan lebih dari 14.000 orang, dan upaya untuk merundingkan penyelesaian politik terhenti.

"Mungkin di suatu tempat di Central Park atau Madison Square Garden, suara tembakan itu tidak terdengar sekeras itu," kata Zelenskyy, merujuk pada landmark dekat markas besar PBB di New York. Dewan Keamanan PBB yang kuat, di mana Rusia memiliki hak veto, tidak pernah mampu untuk mengambil tindakan di Ukraina.

"Tidak ada yang merasa aman lagi di dunia ini," kata Zelenskyy, memperingatkan agar tidak membiarkan kepentingan nasional melecehkan hubungan internasional dan hanya meninggalkan "aturan kekerasan."

Juga, katanya, dunia tidak secara bermakna menangani masalah yang melintasi banyak garis nasional: perubahan iklim, kelaparan, kemiskinan, buta huruf, polusi udara, kurangnya akses ke air minum, dan banyak lagi.

"Setiap kali para pemimpin berkumpul untuk majelis, seolah-olah kami memilih untuk memberikan semacam hadiah 'Kemalangan Global Tahun Ini,'" hanya untuk digantikan oleh yang lain," katanya.

"Dunia hanya membuang semua kemalangan itu ke dalam tas besar, dan sekarang sudah merobek jahitannya," keluh Zelenskyy.

"PBB seperti pensiunan pahlawan super yang sudah lama lupa betapa hebatnya mereka dulu," cetusnya.

Tapi dia melanjutkan dengan menyebutkan alasan untuk diingat. Dia menunjuk upaya PBB seperti tonggak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, program pangan, misi penjaga perdamaian dan UNICEF, badan yang membantu anak-anak di lebih dari 190 negara dan wilayah. "Itu adalah aset kami yang paling berharga," kata Zelenskyy. "Dan itulah mengapa tidak akan pernah dangkal atau ketinggalan zaman untuk menyerukan persatuan demi mereka," tukasnya. ● gul

Biden dan Macron Perbaiki Hubungan Tegang Akibat AUKUS

PARIS(IM)-Amerika Serikat (AS) dan Prancis bergerak untuk memperbaiki hubungan pada Kamis (23/9). Prancis setuju untuk mengizinkan dua besarnya kembali ke Washington dan Gedung Putih mengakui kekeliruan dalam menengahi kesepakatan dengan Australia tanpa berkonsultasi dengan sekutunya itu.

"Kedua pemimpin sepakat bahwa situasi akan diuntungkan dari konsultasi terbuka di antara sekutu mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan strategis bagi Prancis dan mitra Eropa kami," kata pernyataan bersama AS dan Prancis.

Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara melalui telepon selama 30 menit. Kedua pemimpin sepakat untuk menggelar konsultasi mendalam untuk membangun kembali kepercayaan dan bertemu di Eropa pada akhir Oktober.

"Presiden Biden menyampaikan komitmennya yang berkelanjutan dalam hal itu," ujar pernyataan tersebut.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan, Washington berkomitmen untuk menin-

gkatkan dukungan terhadap operasi kontra-terorisme di Sahel yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. AS menyorotkan kelanjutan dari dukungan logistik daripada mengerahkan pasukan khusus.

Seruan Biden kepada Macron adalah upaya untuk memperbaiki hubungan setelah Prancis menuduh sekutunya itu menikamnya dari belakang. Tuduhan ini muncul usai Australia membatalkan kontrak senilai 40 miliar dolar AS untuk kapal selam konvensional dan memilih kapal selam bertenaga nuklir yang akan dibangun dengan AS dan teknologi Inggris sebagai gantinya. Marah dengan kesepakatan Australia, Inggris, AS (AUKUS), Prancis menarik dua besarnya dari Washington dan Canberra.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menggambarkan panggilan itu sebagai komunikasi yang ramah dan terdengar penuh harapan untuk meningkatkan hubungan. "Presiden telah melakukan panggilan telepon yang bersahabat dengan presiden Prancis di mana mereka sepakat untuk bertemu

pada Oktober dan melanjutkan konsultasi erat dan bekerja sama dalam berbagai masalah," katanya.

Ditanya apakah Biden meminta maaf kepada Macron "Dia mengakui bahwa mungkin ada konsultasi yang lebih besar," ujar Psaki.

Prancis memiliki 5.000 personel pasukan kontra-terorisme yang kuat yang memerangi milisi di seluruh Sahel. Negara itu mengurangi kontingennya menjadi 2.500-3.000, memindahkan lebih banyak aset ke Niger, dan mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk menyediakan pasukan khusus untuk bekerja bersama pasukan lokal. AS memberikan dukungan logistik dan intelijen.

Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan AS militer akan terus mendukung operasi Prancis. Namun, dia menolak untuk berspekulasi tentang potensi peningkatan atau perubahan di pendampingan AS di wilayah itu. "Ketika saya melihat kata kerja memperkuat, apa yang saya ambil adalah bahwa kita akan tetap berkomitmen untuk tugas itu," kata Kirby. ● tom



PERTEMUAN PM INGGRIS DAN PRESIDEN UKRAINA

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di kediaman diplomatik Inggris, di sela-sela Sesi ke-76 Majelis Umum PBB, di New York City, AS, Rabu (22/9).

AS Bebaskan Ribuan Imigran Haiti

DEL RIO(IM) - Ribuan imigran Haiti yang berkemah di sebuah kota kecil perbatasan Texas, telah dibebaskan di Amerika Serikat (AS). Seorang pejabat AS mengatakan, AS membebaskan warga Haiti dalam skala yang sangat besar dalam beberapa hari terakhir.

Pejabat yang berbicara dengan syarat anonim tersebut mengatakan para imigran Haiti itu telah dibebaskan dengan pembentahan untuk hadir di kantor imigrasi dalam waktu 60 hari. Departemen Keamanan Dalam Negeri telah memindahkan warga Haiti dari Del Rio ke El Paso, Laredo dan Lembah Rio Grande di sepanjang perbatasan Texas. Selain itu, pemerintah AS pekan ini menambahkan penerbangan ke Tucson, Arizona. Pejabat itu menerangkan para imigran diproses oleh Patroli Perbatasan di lokasi tersebut.

Seorang pejabat AS lainnya yang juga berbicara dengan syarat anonim menjelaskan sebagian besar warga Haiti sedang diproses di bawah undang-undang imigrasi. Pihak berwenang AS dalam beberapa hari terakhir berupaya menyediakan penerbangan untuk memindahkan para imigran Haiti. Pesawat Coast Guard membawa warga Haiti dari Del Rio ke El Paso. Rencananya ada tujuh penerbangan harian ke Haiti yang mulai Kamis (23/9).

Pembebasan itu dilakukan di tengah upaya cepat untuk mengosongkan kamp di bawah jembatan yang diperkirakan menampung lebih dari 14 ribu orang selama akhir pekan. Sejauh ini tidak ada kriteria untuk menentukan siapa yang diterbangkan ke Haiti dan siapa yang dibebaskan di AS. Akan tetapi dua pejabat AS mengatakan orang dewasa lajang adalah prioritas untuk diterbangkan.

Gedung Putih menghadapi kecaman bipartisan yang tajam. Partai Republik menuding kebijakan pemerintahan Presiden Joe Biden membuat warga Haiti percaya bahwa mereka akan

mendapatkan suaka. Demokrat mengungkapkan kemarahan setelah sebuah foto yang viral di media sosial menunjukkan agen Patroli Perbatasan menggunakan tindakan agresif terhadap para migran.

Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tentang situasi Haiti. Ebrard mengatakan sebagian besar warga Haiti sudah memiliki status pengungsi di Chile atau Brasil. Mereka mencari suaka ke Meksiko.

Salah satu pejabat federal Meksiko menyebut tiga bus membawa para imigran meninggalkan Acuna pada Selasa pagi menuju Piedras Negras, yang terletak sekitar 90 kilometer di bawah perbatasan. Pejabat lainnya mengatakan pada Senin ada penerbangan dari kota Monterrey ke kota Tapachula dekat perbatasan Guatemala.

Tapachula adalah rumah bagi pusat penahanan imigran terbesar di Amerika Latin. Penerbangan tersebut membawa sekitar 100 migran yang telah dijemput di sekitar stasiun bus di Monterrey, sebuah hub untuk berbagai rute utara ke perbatasan AS.

Pejabat lainnya mengatakan pemerintah berencana memindahkan semua warga Haiti yang sudah meminta suaka di Meksiko ke Tapachula. Para migran Haiti yang sudah berada di pusat penahanan Meksiko dan belum meminta suaka akan diterbangkan pulang ke Haiti.

Di sekitar Ciudad Acua, pihak berwenang Meksiko meningkatkan upaya untuk memindahkan para migran dari perbatasan. Agen imigrasi melakukan penggerebekan di hotel-hotel yang diketahui menampung para migran. "Tiba-tiba mereka mengetuk pintu dan (berteriak) 'imigrasi', 'polisi', seolah-olah mereka sedang mencari pengedar narkoba," kata Freddy Register, seorang warga Venezuela berusia 37 tahun yang tinggal di salah satu hotel bersama istrinya, Vedette Dollard. ● gul



PEMBATASAN SOSIAL DI SINGAPURA

Seorang pria memakai masker melewati papan tanda dipasang untuk menghimbau warga melakukan jarak sosial selama terjadi wabah virus corona (COVID-19), di Marina Bay, Singapura, Rabu (22/9).

Duterte Tuduh Negara Kaya Timbun vaksin Covid-19

ANKARA(IM)-Presiden Filipina Rodrigo Duterte menuduh negara-negara kaya menimbun vaksin Covid-19, sementara yang miskin menunggu tetesannya. "Gambarnya suram. Ada kekerangan buatan manusia atas vaksin yang melanda negara-negara miskin," kata Duterte dalam rekaman video yang ditayangkan pada sidang ke-76 Majelis Umum PBB.

"Negara-negara kaya menimbun vaksin penyelamat nyawa sementara negara-negara miskin menunggu tetesannya. Mereka sekarang berbicara tentang suntikan booster, sementara negara berkembang mempertimbangkan setengah dosis hanya untuk bertahan," tambah dia.

Duterte menggambarkan perkembangan itu sebagai sesuatu yang mengejutkan dan egois yang tidak dapat dibenarkan secara rasional maupun moral. Presiden mengatakan pandemi Covid-19 tidak akan berakhir kecuali virus itu dikalahkan di mana-mana.

"Vaksin adalah kunci untuk mencapai ini," ujar dia.

Duterte juga mendesak mitra istimewa untuk sepenuhnya mendukung COVAX, inisiatif berbagi vaksin global yang dipimpin oleh PBB. WHO telah berulang kali mengungkap negara-

negara kaya karena menimbun vaksin Covid-19 dan telah menyerukan penghentian booster hingga akhir tahun.

Vaksinasi Covid-19 di Filipina dimulai pada Maret dan terus tertinggal oleh kelangkaan dan keterlambatan pengiriman. Menurut Our World in Data, situs web pelacakan yang berafiliasi dengan Universitas Oxford, sekitar 19 juta orang – 17 persen dari populasi Filipina – telah divaksinasi penuh.

Sama seperti Covid-19, Duterte mengatakan perubahan iklim juga telah mengekspos kerentanan yang bervariasi dari negara-negara di seluruh dunia.

"Kita sekarang berada pada titik kritis, di mana kegagalan untuk bertindak mengarah pada konsekuensi bencana bagi seluruh umat manusia," ungkap dia.

Duterte mengatakan Filipina menerima bagian tanggung jawabnya dan akan melakukan bagiannya untuk mencegah bencana kolektif ini. Komitmen iklimnya di hadapan PBB adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Filipina sebesar 75 persen pada 2030. Dalam hal ini, dia mengutip moratorium pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan arahan untuk mengeksplorasi opsi energi nuklir. ● ans

PT PERMATA TENE

Berkedudukan di Jakarta Pusat

PENGUMUMAN

Direksi PT Permata Tene, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan hendak menerbitkan 50.000 saham baru yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Tene Capital, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang sebagian merupakan konversi hutang Perseroan kepada PT Tene Capital menjadi setoran modal.

Penerbitan Saham Baru tersebut akan dilaksanakan dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikomponkan Sebagai Setoran Saham

Jakarta, 24 September 2021

Direksi,
PT PERMATA TENE